

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. DPR memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengangkatan duta besar, yang berfungsi sebagai lembaga pengawas dan pengontrol terhadap kebijakan yang diambil oleh Presiden. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, pengangkatan duta besar oleh Presiden harus melalui persetujuan DPR. Proses ini mencerminkan prinsip checks and balances yang ada dalam sistem pemerintahan, di mana kekuasaan eksekutif tidak berjalan sepenuhnya tanpa pengawasan dari lembaga legislatif. Melalui mekanisme *fit and proper test*, DPR dapat melakukan evaluasi mendalam terhadap calon duta besar yang diajukan oleh Presiden. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang dipilih memiliki kompetensi, integritas, dan pengalaman yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas diplomatik yang kompleks dan sensitif. Dalam konteks ini, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan duta besar tidak bisa diabaikan. DPR, sebagai wakil rakyat, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa calon duta besar yang dipilih bukan hanya sesuai dengan kriteria formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang diharapkan oleh masyarakat. Proses pengangkatan yang melibatkan DPR diharapkan dapat mencegah praktik nepotisme atau pengangkatan yang didasarkan pada kepentingan politik tertentu, sehingga menjamin bahwa duta besar yang terpilih benar-benar dapat mewakili kepentingan bangsa dan negara.
2. DPR juga berperan penting dalam menentukan arah dan strategi diplomasi Indonesia melalui pengangkatan duta besar. Sebagai wakil rakyat, DPR harus memastikan bahwa duta besar yang diangkat dapat menjalankan tugasnya dengan efektif, dalam upaya memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara lain. Duta besar berfungsi sebagai perwakilan resmi negara, yang tidak hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan kebijakan luar negeri

Indonesia, tetapi juga untuk membangun relasi yang baik dengan mitra luar negeri. Kualitas dan kapabilitas duta besar berpengaruh langsung terhadap reputasi Indonesia di kancah internasional. Duta besar yang mampu bernegosiasi dan berkomunikasi dengan baik akan lebih efektif dalam mempromosikan kepentingan ekonomi, budaya, dan politik Indonesia. Hal ini dapat berdampak positif terhadap hubungan bilateral, perdagangan, dan kerjasama internasional lainnya. Sebaliknya, pengangkatan duta besar yang tidak tepat atau dipenuhi dengan konflik kepentingan dapat merugikan citra Indonesia dan menghambat diplomasi negara. Dengan demikian, sinergi antara DPR dan Presiden dalam proses pengangkatan duta besar sangat penting untuk memastikan bahwa individu yang dipilih benar-benar mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang besar dalam memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. DPR, melalui pengawasan dan evaluasi yang ketat, dapat membantu menciptakan duta besar yang mampu menjembatani kepentingan rakyat dengan kebijakan pemerintah.

3. Dari perspektif *Siyāṣah Syar'iyah*, pengangkatan duta besar harus dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan umum. Dalam hal ini, duta besar bukan hanya sekadar wakil pemerintah, tetapi juga harus menjadi representatif yang membawa suara dan aspirasi rakyat. Seorang duta besar diharapkan memiliki nilai-nilai moral dan etika yang baik, sehingga ia dapat menjalankan tugas diplomatiknya sesuai dengan prinsip syariat yang menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan duta besar juga harus berlandaskan pada pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan budaya masyarakat. Pengangkatan duta besar yang memperhatikan latar belakang dan aspirasi rakyat akan lebih mampu menciptakan kepercayaan dan legitimasi di mata publik. Dengan demikian, duta besar yang dipilih tidak hanya akan efektif dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga akan menjadi simbol integritas dan keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Secara keseluruhan, pengangkatan duta besar di Indonesia merupakan suatu langkah strategis yang tidak hanya berpengaruh pada hubungan internasional, tetapi juga membawa dampak signifikan bagi masyarakat. Melalui proses yang transparan dan akuntabel, serta berdasarkan prinsip-prinsip *Siyāṣah Syar'iyah*, diharapkan duta besar yang diangkat dapat memperkuat diplomasi Indonesia dan memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Dengan kolaborasi yang baik antara DPR dan Presiden, serta pengangkatan duta besar yang berbasis pada kriteria yang jelas dan objektif, Indonesia dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan harmonis dengan negara-negara lain, sekaligus memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi rakyat tetap terjaga dalam setiap langkah kebijakan luar negeri.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas, terdapat beberapa saran penting untuk memperbaiki dan memperkuat proses pengangkatan duta besar di Indonesia. Pertama, DPR harus terus memperkuat perannya dalam mengawasi proses pengangkatan duta besar. Dalam hal ini, DPR perlu memastikan bahwa calon duta besar yang diusulkan oleh Presiden benar-benar memenuhi kriteria kompetensi, integritas, dan moralitas yang tinggi. Proses pengawasan bisa lebih efektif dengan memperketat mekanisme *fit and proper test* serta meningkatkan transparansi dalam setiap tahap evaluasi.

Selanjutnya, penting untuk lebih memprioritaskan kualitas dan kapabilitas calon duta besar guna menjaga dan memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara lain. Duta besar yang diangkat harus memiliki kemampuan diplomatik yang solid, memahami konteks geopolitik global, dan mampu menjalankan peran strategis dalam negosiasi dan diplomasi internasional. Dengan demikian, Indonesia akan lebih siap untuk menghadapi tantangan diplomatik serta memperjuangkan kepentingan nasional di panggung internasional. Selain itu, perlu ada sinergi yang lebih kuat antara DPR dan Presiden dalam proses pengangkatan duta besar. Kolaborasi ini penting untuk mencegah terjadinya konflik atau perbedaan

pendapat yang berpotensi merugikan negara. Baik DPR maupun Presiden harus saling mendukung dan bekerja sama untuk memastikan bahwa duta besar yang dipilih benar-benar mampu menjalankan tugas diplomatik dengan baik, sesuai dengan kepentingan nasional dan aspirasi rakyat Indonesia.

